



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
kemdikbud.go.id

LAPORAN KINERJA



■ 2020 ■

BIRO PERENCANAAN

**Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C, Lt. 6-7
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270**



[Kemdikbud.RI](#)



[kemdikbud.ru](#)



[kemdikbud ri](#)



[Kemdikbud-RI](#)



[KEMDIKBUD RI](#)

Kata Pengantar

KEPALA BIRO PERENCANAAN



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 ini dapat selesai disusun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan 2020-2024.

Laporan Kinerja ini mencakup didalamnya aspek-aspek pencapaian kinerja, serapan anggaran, kendala dan permasalahan serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

Akhir kata, saya ucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2020.

Jakarta, 31 Januari 2021

Kepala Biro Perencanaan

REPUBLIC
INDONESIA

M. Samsuri

NIP 196712311994031012

Daftar Isi

i KATA PENGANTAR

ii DAFTAR ISI

iii IKHTISAR EKSEKUTIF

1 BAB I PENDAHULUAN

- 1 A. Gambaran Umum
- 3 B. Dasar Hukum
- 3 C. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
- 15 D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

17 BAB II PERENCANAAN KINERJA

23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 23 A. Capaian Kinerja Organisasi
- 37 B. Realisasi Anggaran
- 39 C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

40 BAB IV PENUTUP

- 40 A. Kesimpulan
- 40 B. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

41 LAMPIRAN

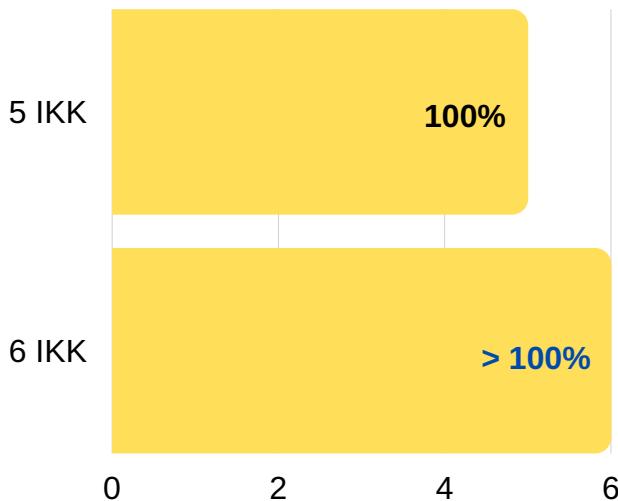
- 41 A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020
- 44 B. Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2020
- 47 C. Tabel Cascading Renstra
- 48 D. Dokumen Pengukuran Kinerja

Iktishar Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Perencanaan memberikan Informasi pencapaian 11 Indikator 2020. Secara umum target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu **6 IKK** mencapai target **100%** dan **5 IKK** melebihi **100%**

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN 2020

Kinerja Substantif



Kinerja Keuangan



Permasalahan/Kendala Utama

- Pandemi Covid yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara Maksimal

Langkah Antisipasi/upaya penyelesaian

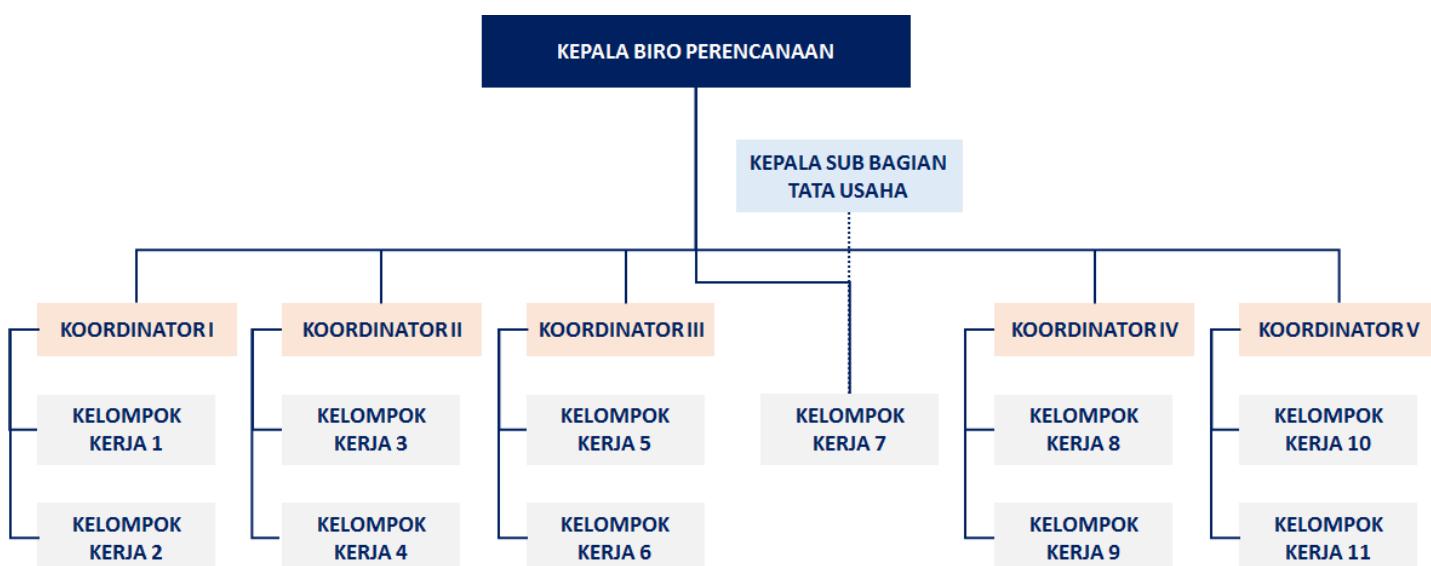
- Melakukan akselerasi kegiatan dan pelaksanaan koordinasi secara intensif menggunakan media conference meeting

Bab I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Biro Perencanaan merupakan satuan kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan didukung pegawai sejumlah 118 orang. Berikut adalah struktur organisasi Biro Perencanaan Sesuai SK Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan nomor 63339/A1/KP/2020.



Gambar 1.1 Struktur Fungsi Biro Perencanaan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2020, sebagai bentuk pelaksanaan tugas, disusun Laporan Kinerja tahun 2020.

Adapun Perjanjian Kinerja berisikan target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun dengan berpedoman pada rencana strategis dan sekaligus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kemdikbud.

Laporan kinerja Biro Perencanaan, menyajikan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan yang terperinci dalam satu tahun anggaran yang dilakukan oleh Satker Biro Perencanaan pada 5 Fungsi dan 1 Subbagian Tata Usaha dalam suatu kinerja yang berorientasi kepada hasil (outcome).

Dalam pelaksanaan pencapaian hasil kinerja, Biro Perencanaan berpedoman kepada tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KOORDINATOR I

Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1

Kelompok Kerja 1 :

Perencanaan Program dan Anggaran 1 (Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).

Kelompok Kerja 2 :

Perencanaan Program dan Anggaran 2 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Direktorat Jenderal Kebudayaan).

KOORDINATOR III

Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer

Kelompok Kerja 5 :

Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah.

Kelompok Kerja 6 :

Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.

Kelompok Kerja 7 :

Data dan Sistem Informasi

KOORDINATOR IV

Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Kerja 8 :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 (Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi).

Kelompok Kerja 9 :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 (Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan).

KOORDINATOR II

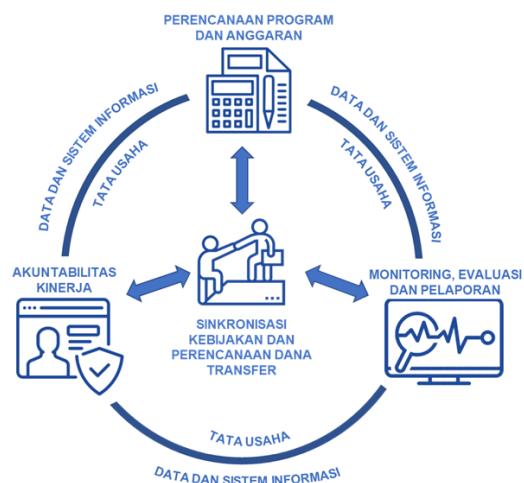
Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2

Kelompok Kerja 3 :

Program dan Anggaran 3 (Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Surat Berharga Syariah Negara).

Kelompok Kerja 4 :

Perencanaan Program dan Anggaran 4 (Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Perencanaan Pinjaman dan Pendapatan).



KOORDINATOR V

Fungsi Akuntabilitas Kinerja

Kelompok Kerja 10 :

Akuntabilitas Kinerja 1 (Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi).

Kelompok Kerja 11 :

Akuntabilitas Kinerja 2 (Kementerian, Insektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan).

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 2 ayat (1 dan 2);

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi berikut:

- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
- pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Biro Perencanaan terdiri dari 5 Fungsi, dan 1 Subbagian, setiap Fungsi dikepalai oleh seorang Koordinator, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran (PPA) 1

Tugas dan Fungsi

Melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam hal ini, Koordinator I yang mengepalai Fungsi PPA 1, dibantu oleh Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 serta Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Fungsi PPA 1 dibagi menjadi dua Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran I (PPA 1)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Tugas dan Fungsi POKJA 1

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi: angka dasar (pagu awal),
 - a. pagu indikatif,
 - b. pagu anggaran, dan
 - c. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;

- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 11) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD), Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran II (PPA 2)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 memiliki wilayah kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi POKJA 2

- 1) penyusunan rencana kerja;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses DIPA;
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok

Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran (PPA) 2

Tugas dan Fungsi

Melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam hal ini, Koordinator II dibantu oleh Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 serta Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Fungsi PPA 2 dibagi menjadi dua Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran III (PPA 3)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta SBSN.

Tugas dan Fungsi POKJA 3

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;

- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) penyusunan usulan SBSN;
- 11) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana SBSN;
- 12) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan SBSN; dan
- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 4 (PPA 4)

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki wilayah kerja di lingkungan lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta PHLN.

Tugas dan Fungsi POKJA 4

- 1) penyusunan rencana kerja;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
- d. alokasi anggaran dalam proses DIPA;
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) penyusunan usulan Dana PHLN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
- 10) usulan revisi anggaran PHLN, PNBP, dan BLU;
- 11) pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya;

- 12) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana PHLN, PNBP, dan BLU;
- 13) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan PHLN, PNBP, dan BLU; serta
- 14) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer

Tugas dan Fungsi

Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah serta Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. Dalam hal ini, Koordinator III dibantu oleh Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah serta Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer dibagi menjadi tiga Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

a. Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Transfer Daerah

Tugas dan Fungsi POKJA 5

- 1) penyusunan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik;
- 2) penilaian usulan DAK Fisik dan Non Fisik;

- 3) penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan;
- 4) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah;
- 5) monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK;
- 6) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK;
- 7) menyiapkan dukungan penyusunan instrumen penilaian kinerja daerah terbaik pada aspek pengelolaan dana transfer daerah dan pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah;
- 8) menyiapkan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK; dan
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Tugas dan Fungsi POKJA 6

- 1) penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) asistensi penyusunan Rencana Strategis Kementerian, Unit Pelaksana Teknis dan Daerah;
- 3) memastikan kesesuaian Rencana Kerja dengan Rencana Strategis;
- 4) penyusunan bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran, seperti Rencana Aksi Nasional, risalah kebijakan atau policy brief, infografis, kaleidoskop, dan bahan-bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran lainnya yang relevan;
- 5) sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah serta koordinasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD);
- 6) menyiapkan bahan kebijakan Kementerian secara berkala dalam bentuk paparan dan/atau infografis;
- 7) analisis cepat sesuai kebutuhan Biro Perencanaan terkait dengan kebijakan dan hal-hal khusus lainnya;
- 8) merancang kegiatan diskusi dengan pakar, tenaga ahli, akademisi, dan kalangan intelektual lainnya yang relevan; dan
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

c. Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

Tugas dan Fungsi POKJA 7

- 1) menyediakan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, termasuk Neraca Pendidikan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja di Biro Perencanaan;
- 2) mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi di bidang perencanaan (mulai dari angka dasar pagu awal, hingga alokasi anggaran), evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas Kinerja, yang akurat dan dapat diakses bersama;
- 3) mengelola sistem informasi di Biro Perencanaan agar menjadi sistem informasi yang handal;
- 4) membangun kolaborasi data dengan Kementerian/Lembaga yang relevan dengan Kebutuhan Biro Perencanaan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Data dan Informasi, serta Direktorat Direktorat Jenderal terkait lainnya yang relevan;
- 5) mengolah data bersama kelompok kerja yang membutuhkan; dan
- 6) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Program dan Anggaran Transfer Daerah, Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, serta Kelompok Kerja Data dan Informasi, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya..

4. Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibagi menjadi 2 Kelompok Kerja, yaitu:

a. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tugas dan Fungsi POKJA 8

- 1) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kementerian;
- 2) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
- 3) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;

- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 7) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk infografi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 8) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden dihadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 10) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 11) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau control room untuk Program-Program Prioritas;
- 12) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 memiliki wilayah kerja meliputi Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi POKJA 9

- 1) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;

- 2) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
- 4) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk infografi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 7) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden dihadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 9) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 10) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau control room untuk Program-Program Prioritas;
- 11) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 12) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 dan Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Fungsi Akuntabilitas Kinerja.

Tugas dan Fungsi

Melakukan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Fungsi Akuntabilitas Kinerja dibagi menjadi 2 kelompok kerja, yaitu:

a. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1

memiliki wilayah kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tugas dan Fungsi POKJA 10

- 1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- 2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 3) penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
- 4) koordinasi penyusunan hasil evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
- 5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 6) penyiapan bahan RBI untuk area perubahan SAKIP;
- 7) mengawal proses penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kerjanya;
- 8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik;
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 2

Memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi POKJA 11

- 1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian;
- 2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 3) penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
- 4) koordinasi penyusunan hasil evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
- 5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 6) penyiapan bahan RBI untuk area perubahan SAKIP;
- 7) mengawal proses penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kerjanya;
- 8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik; dan
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1 dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan, guna melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kendala dalam hal koordinasi dan pengendalian program dan Perencanaan pada satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan satker di provinsi terkait dana dekonsentrasi dalam hal penyusunan RKP, Renja, RKA dan koordinasi pengesahan anggaran.
2. Adanya permasalahan dalam mengumpulkan data evaluasi hasil capaian sasaran strategis per satker di lingkungan kemendikbud.
3. Terlalu banyaknya aplikasi yang fungsi dan pengunaannya tumpang tindih antara satu dengan yang lain.

Dari permasalahan yang dikemukakan tersebut maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian Biro Perencanaan antara lain:

- Terlalu banyaknya aplikasi yang fungsi dan pengunaannya tumpang tindih antara satu dengan yang lain sehingga tidak efektif dan efisien, perlu adanya suatu aplikasi yang dapat menyatukan itu semua yang dapat mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi tersebut dengan menggunakan single sign-on.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbud Biro Perencanaan telah menetapkan Visi dan Misi pada Renstra 2020-2024 Biro Perencanaan sebagai berikut:

Visi

“Terdepan dalam mewujudkan perencanaan kebijakan, program dan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien”

Misi

“Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”

Visi dan Misi yang sudah ditetapkan didukung dengan 4 (empat) Fokus Kesuksesan yaitu:

- 1** Optimalisasi koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 2** Sinkronisasi dan analisis kebijakan pusat dan daerah
- 3** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran beserta pemanfaatan hasilnya
- 4** Sinkronisasi dan analisis kebijakan pusat dan daerah

Empat Fokus Kesuksesan Biro Perencanaan dapat diukur dengan ketercapaian 4 Indikator Kinerja Program (IKP) dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja tahunan.

Perencanaan Kinerja Biro Perencanaan terbagi dalam 4 (empat) Sasaran Strategis Kegiatan (SK) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 versi dari Perencanaan Kinerja yaitu Perencanaan Kinerja awal tahun dan Perencanaan Kinerja Akhir tahun yang merupakan penyesuaian terkait revisi komponen anggaran pada Akhir tahun anggaran 2020.

Berikut tabel yang menggambarkan 4 IKP dan 11 IKK Biro Perencanaan

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Target Renstra 2024
		Target	satuan	
SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang berkualitas			
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB	Predikat	Predikat A
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
IKP 1.1.8	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	71,5	Indeks	Indeks 77,5
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	16	%	35.4%
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja			
SK	Meningkatnya Kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud			
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100	%	100%
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	90	%	91%
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik	Kategori	Kategori Baik
SK	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan			
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1	Item	5 item
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	70	%	94%
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72	%	80%
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	70	%	74%
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola akuntabilitas Kinerja Kemendikbud			
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3	Laporan	3 laporan
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	36	%	80%
SK	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan			
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	BB	Predikat	Predikat A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan Minimal 80	80	nilai	Nilai 80

Sasaran Program: Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang berkualitas,
Realisasinya didukung oleh 4 Indikator Kinerja, yaitu:

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud.

Pada tahun 2020, ditargetkan kinerjanya dengan predikat BB dengan anggaran sebesar Rp6.469.446.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Layanan Akuntabilitas Kinerja Kementerian;

2. Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud.

Pada tahun 2020, ditargetkan kinerjanya dengan Kategori Sangat Baik dengan anggaran sebesar Rp11.374.832.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud;
 - Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3. Indeks efektivitas pengelola Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun 2020, ditargetkan kinerjanya yaitu Indeks 71.5 dengan anggaran sebesar Rp 7.846.748.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan, dengan komponen:
 - Perencanaan Program dan Anggaran
 - Asistensi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Daerah
 - Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah.

4. Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah.

Pada tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebesar 16% dengan anggaran sebesar Rp 16.227.141.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan, dengan komponen:
 - Perencanaan Program dan Anggaran;

Sasaran Strategis Kegiatan pertama : Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud, Realisasinya didukung oleh 3 Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud.

Pada tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp2.730.842.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap 100% dan target anggaran sebesar Rp2.730.842.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Naskah Kebijakan Bidang Pendidikan;
- Layanan Perencanaan
 - Sinkronisasi dan Analisis Kebijakan.

2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebesar 92.25% dengan anggaran sebesar Rp538.290.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja menjadi 90% dan target anggaran sebesar Rp538.290.000,-.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen sebagai berikut:
 - Pemantauan Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Kemendikbud.

3. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya yaitu Predikat Baik dengan anggaran sebesar Rp 8.076.410.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap yaitu Predikat Baik dan jumlah anggaran sebesar Rp 8.076.410.000,-

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Pengendalian Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud;
 - Pemantauan Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Kemendikud;
 - Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sasaran Strategis Kegiatan ke 2 : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan, Realisasinya didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah. Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebanyak 1 item dengan

anggaran sebesar Rp16.227.141.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebanyak 1 item dan jumlah anggaran Rp16.227.141.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Perencanaan, dengan suboutput:
 - Analisis Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Penyusunan Masukan RKP dan Renja;
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - Koordinasi Pengesahan Revisi Anggaran;

2. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebesar 70% dengan anggaran sebesar Rp342.840.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebesar 70% dan jumlah anggaran Rp342.480.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran:
 - Asistensi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Daerah.

3. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebesar 72% dengan anggaran sebesar Rp 7.503.908.000,-, setelah revisi terakhir, target kinerja tetap sebesar 72% orang dan jumlah anggaran tetap sebesar Rp7.503.908.000,-.261.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Perencanaan, dengan subkomponen:
 - Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah.

4. Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebesar 71% dengan anggaran sebesar Rp169.440.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja menjadi 70% dan jumlah anggaran sebesar Rp169.440.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan subkomponen:
 - Pemutakhiran Sistem Informasi Realisasi Dana Transfer ke Daerah (DAK) Bidang Pendidikan (SIMTRADA).

Sasaran Strategis Kegiatan ke 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud, Realisasinya didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebanyak 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp 629.548.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap sebanyak 3 Laporan dan jumlah anggaran Rp629.548.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Akuntabilitas Kinerja, dengan suboutput:
 - Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal;
 - Penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbud;
- Layanan Dukungan Manajemen Satker, dengan suboutput:
 - Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan;

2. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A .

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya sebanyak 45% dengan anggaran sebesar Rp6.051.032.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja sebesar 36% dan jumlah anggaran Rp6.051.032.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Akuntabilitas Kinerja Kementerian, dengan suboutput:
 - Penilaian dan Peningkatan SAKIP.

Sasaran Strategis Kegiatan ke 4 : Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan,

Realisasinya didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya yaitu Predikat BB dengan anggaran sebesar Rp2.132.466.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap Predikat BB dan jumlah anggaran Rp2.132.466.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Dukungan Manajemen Satker, dengan suboutput:
 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan ;
 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80.

Pada awal tahun 2020, ditargetkan kinerjanya dengan nilai 80 dengan anggaran sebesar Rp16.227.141.000,-, setelah revisi terakhir target kinerja tetap dengan nilai 80 dan jumlah anggaran Rp16.227.141.000,-.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Dukungan Manajemen Satker, dengan suboutput:
 - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Renstra 2024	Capaian Renstra 2020	%
		Target	Realisasi	%			
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB	BB	100	A	BB	80%
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik	Sangat Baik	100	Sangat Baik	Sangat Baik	100
IKP 1.1.8	Indeks efektivitas pengelola Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	71,50	90,70	126,85	77,50	90,70	117%
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	16%	17,9	111,88	35,4%	17,9	50,57

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Target Renstra 2024	Capaian Renstra 2020	%
	Target	Realisasi	%			
1. Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100%	100%	100%	100%	100%	100
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	90%	100%	111%	91%	100%	109,9
3. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori Baik	Kategori Sangat Baik	100%	Kategori Baik	Kategori Sangat Baik	100
4. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item	1 item	100%	5 item	1 item	20
5. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	70%	90,70%	129,5%	94%	90,70%	96,5
6. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72%	97,70%	135,7%	80%	97,70%	122,1
7. Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	70%	75,50%	107,8%	74%	75,50%	102
8. Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100
9. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	36%	36%	100%	80%	36%	45
10. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat BB	Predikat A	100%	Predikat A	Predikat A	100
11. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai 80	Nilai 97,68,	122,1%	Nilai 80	97,68	122,1

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran secara umum mengenai capaian Rencana Strategis yang diukur melalui capaian Indikator Kinerja.

Terdapat 4 Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud, Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan, Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud dan Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan, yang didukung oleh 11 Indikator Kinerja Kegiatan.

Untuk lebih jelasnya secara detil dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kegiatan pertama : Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud, Realisasinya didukung oleh 3 Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud.

Outcome (dampak) dari tercapainya persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud adalah Satker di lingkungan kemendikbud memiliki pedoman yang terarah setiap tahunnya dalam melaksanakan program dan anggaran, sesuai dengan kebijakan jangka menengah kemendikbud.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebesar 100%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Naskah Kebijakan Bidang Pendidikan;
- Layanan Perencanaan
 - Sinkronisasi dan Analisis Kebijakan



Gambar 1.2 Kegiatan Sinkronisasi dan analisis Kebijakan Kemendikbud



Gambar 1.3 Dokumen Kebijakan (Renstra) Kemendikbud dan Sekretariat Jenderal yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA di lingkungan kemendikbud

Realisasi dapat mencapai target karena pada prinsipnya Dokumen Kebijakan Jangka Menengah (Renstra) telah disusun dan dimiliki oleh masing-masing satker di lingkungan kemendikbud dan Biro Perencanaan melakukan evaluasi dan secara berkala melakukan pembinaan dan koordinasi dalam hal penyusunan Dokumen Kebijakan Tahunan (Renja) untuk memastikan keterkaitan dan kesesuaian antara kebijakan dalam Renstra jangka menengah dan Kebijakan tahunan masing satker di lingkungan kemendikbud.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Kelompok Kerja Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, karena banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun.

Untuk menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara:

- Memaksimalkan SDM yang ada saat ini dengan pendekatan peningkatan kemampuan pegawai melalui workshop dan short course sehingga dapat membantu beban kerja sebagian pegawai yang sudah overload

2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

Outcome (dampak) dari tercapainya persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran adalah membaiknya kualitas dari Kebijakan, Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di lingkungan kemendikbud, karena mengacu kepada hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pimpinan unit utama yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebesar 90%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 100% dengan persentase capaian sebesar 111%.

Realisasi target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen sebagai berikut:
 - Pemantauan Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Kemendikbud.



Gambar 1.4 Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi mencapai target dimungkinkan karena: seluruh rekomendasi tertulis hasil evaluasi oleh pimpinan unit utama kemendikbud, Bappenas, Kemenkeu dan Kemenpan RB, dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan dalam hal :

- a. Keadaan pandemi Covid–19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi capaian kinerja, terutama kegiatan melalui luring.

- b. Adanya pembatasan wilayah (PSBB) yang mengakibatkan proses mobilisasi berbagai sumber daya terhambat.

Untuk menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan koordinasi dengan satker-satker di seluruh unit utama kemendikbud maupun di provinsi dengan menggunakan media berbasis online dan rapat conference meeting dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting.

3. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik.

Outcome (dampak) dari Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik adalah.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya dengan predikat Baik, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi dengan predikat Baik dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut :

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Pengendalian Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud;
 - Pemantauan Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Kemendikud;
 - Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.



Gambar 1.5 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan bulanan

Realisasi sesuai target dimungkinkan karena dilakukannya optimalisasi Pelaksanaan kegiatan setelah adanya restrukturisasi organisasi, dengan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemendikbud Bulanan, Triwulan dan Semesteran.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan :

- a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Fungsi Monitoring dan Pelaporan, karena banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan memiliki kendala dalam mengoperasikan Teknologi Informasi.

- b. Kendala dalam hal perbedaan standarisasi format bahan Evaluasi yang beragam antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan K/L lain.
- c. Pandemi Covid-19 yang menghambat beberapa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperbanyak Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang Evaluasi Program dan meningkatkan kemampuan Pegawai dengan Workshop/Short Course dan Pelatihan di bidang Teknologi Informasi.
- b. Meningkatkan Koordinasi lintas Kementerian untuk mendapatkan Format bahan evaluasi yang sesuai dengan K/L yang terkait dan menyiapkan draft bahan-bahan tersebut dari jauh-jauh hari sehingga memiliki waktu yg cukup untuk mendapatkan input dari masing-masing unit utama untuk menyusun bahan Evaluasi tersebut.
- c. Penggunaan Media meeting online menggunakan Zoom Meeting dan aplikasi sejenisnya utk meminimalisir pertemuan tatap muka.

Kode K/L	Kode Unit	Kode Satker	Nama Satker	Penyerapan Anggaran	Konsistensi RPD Awal	Konsistensi RPD Akhir	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA (60%)	Nilai IKPA (40%)	Total Nilai Kinerja
23	1	137590	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	95.81	42.22	94.59	100	20	98.61	97.67	98.23
23	1	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN	99.76	75.22	89.06	100	20	97.99	96.91	97.56
23	1	208803	BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN	92.34	70.99	97.22	100	20	98.75	95.2	97.33
23	1	208810	BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN	97.53	53.07	95.19	100	20	98.88	98.55	98.75
23	1	414593	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI TOKYO	81.8	46.85	70.81	100	20	92.92	79.5	87.55
23	1	414607	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI WASHINGTON DC	83.45	19.57	34.83	100	20	86.53	80.66	84.18
23	1	414613	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI CANBERRA	68.22	26.07	62.91	100	20	90.17	80.43	86.27
23	1	414622	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BANGKOK	88.72	18.63	96.36	100	15.73	95.19	88.55	92.53
23	1	414638	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI DEN HAAG	82.65	48.94	68.02	100	20	92.5	83.09	88.74
23	1	414644	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI KUALA LUMPUR	96.79	0	83.96	100	4.48	85.67	88.78	86.91
23	1	414650	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BERLIN	96.49	47.41	76.87	100	19.56	95.14	90.4	93.24
23	1	414669	KANTOR DUBES / WRI UNESCO PARIS DI PARIS	80.27	43.37	72.59	100	20	93.1	88.02	91.07
23	1	414681	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI CAIRO	89.07	49.55	99.08	100	19.83	98.65	86.74	93.89
23	1	414690	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI PARIS	77.17	25.6	56.96	100	20	89.95	80.6	86.21
23	1	414701	PUTUS DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	61.72	0	81.53	100	20	92.93	83.74	89.25
23	1	503121	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI LONDON	65.86	13.58	75.58	100	20	92.24	74.98	85.34
23	1	503135	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI PORT MORESBY	74.78	18.42	29.18	100	20	84.66	79.88	82.75
23	1	503142	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI MANILA	90.06	27.25	77.53	100	18.67	94	89.26	92.10
23	1	503143	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI DILI	87.99	46.07	87.39	100	20	96.54	75.5	88.12
23	1	512684	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI RIYADH	91.44	25.8	89.29	100	10.71	90.58	84.14	88.00
23	18	677629	POLITEKNIK NEGERI CILACAP	85.45	0	97.67	98.49	20	97.51	94.29	96.22
23	18	677630	POLITEKNIK NEGERI SUBANG	93.1	0	67.09	100	17.49	91.55	90.41	91.09
23	18	677631	POLITEKNIK NEGERI MADURA	97.54	0	94.1	100	19.59	98.39	90.87	95.38
23	18	677632	POLITEKNIK NEGERI MADIUN	96.13	0	99.22	100	20	99.48	94.98	97.68
23	18	677633	POLITEKNIK NEGERI SAMBAS	57.86	0	91.99	100	20	94.45	91.36	93.21
23	18	677634	POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT	98.53	0	99.25	100	14.69	95.92	96.87	96.30
23	18	677635	POLITEKNIK NEGERI FAKFAK	76.95	0	49.62	100	20	88.59	85.8	87.47
23	18	677636	POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA	85.06	0	65.15	100	20	92.21	96.83	94.06
23	18	677637	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	80.84	0	96.79	100	20	97.56	93.74	96.03
23	18	677638	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR	84.7	0	86.59	100	19.61	95.8	90.21	93.56
23	18	690440	DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	97.96	33.33	91.29	100	6.81	88.79	82.01	86.08
23	18	690441	DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI	79.99	33.33	0	100	20	79.86	88.96	83.50
23	18	690442	DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN	98.61	33.33	94.4	100	13.23	94.01	91.04	92.82
23	18	690443	DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA	82.62	33.33	44.29	100	20	88.17	80.63	85.15
											34051.89
											370
											Rata-Rata Nilai NKA 92.03214

Gambar 1.6 Nilai Rata-Rata Kinerja Anggaran Satker Kemendikbud 92,03 - Kategori sangat baik

Sasaran Strategis Kegiatan 2 : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan, Realisasinya didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah adalah meningkatnya efektifitas pemanfaatan anggaran yang dapat dilakukan oleh sekolah secara langsung, karena jenis belanja diterima oleh sekolah tanpa melalui tahapan prosedural melalui pemda yang akan memakan waktu.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 1 item, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 1 item dengan persentase capaian sebesar 100%.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan, dengan komponen:
 - Perencanaan Program dan Anggaran
 - Asistensi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Daerah
 - Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah.

Walaupun target kinerja telah tercapai, Kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target capaian output tersebut adalah sebagai berikut :

- Peraturan perundangan yang mengatur penyaluran keuangan ke daerah dan pengelolaan keuangan di daerah.

Untuk Menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Koordinasi dengan K/L Terkait untuk mengatur penyaluran langsung ke rekening Sekolah.

2. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan adalah meningkatnya kualitas jenis belanja yang akan dimanfaatkan oleh daerah karena usulan yang diterima dan akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 70%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 90,70% dengan persentase capaian sebesar 129,5%.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan, dengan komponen:
 - Perencanaan Program dan Anggaran
 - Asistensi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Daerah
 - Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah.

3. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output adalah meningkatnya pemanfaatan belanja yang akan dimanfaatkan oleh daerah untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 72%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 97,70% dengan persentase capaian sebesar 135,7%.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan, dengan komponen:
 - Perencanaan Program dan Anggaran
 - Asistensi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Daerah
 - Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah.

4. Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu adalah membaiknya kecepatan dan kepatuhan daerah dalam memberikan laporan dan evaluasi agar dapat diketahui kebijakan tersebut sudah tepat atau perlu disempurnakan kembali.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 70%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 75,5% dengan persentase capaian sebesar 107,8%.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan, dengan komponen:
 - Perencanaan Program dan Anggaran
 - Asistensi Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Daerah
 - Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah.



Gambar 1.7 Kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi Anggaran Transfer Daerah

Sasaran Strategis Kegiatan 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud, Realisasinya didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu adalah Terpenuhinya jadwal dan tenggat waktu penyelesaian laporan Kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh K/L/ pembina SAKIP. Adapun jadwal penyelesaian Laporan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan adalah, LAKIP Satker 31 januari, Lakip Setjen 14 Februari dan Lakip Kementerian yaitu tanggal 28 Februari .

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 3 laporan, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian sebesar 100%.

Perealisan target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Layanan Akuntabilitas Kinerja Kementerian;

Walaupun target kinerja telah tercapai, Kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target capaian output tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya satker yang terlambat memberikan data dukung capaian kinerja dari baik itu dari internal satker sendiri, antar satker di lingkungan kemendikbud dan unit tingkat eselon 1.
- b. Karena ada restrukturisasi organisasi sehingga berpengaruh terhadap penyampaian Laporan Kinerja.
- c. Adanya perbedaan capaian kinerja antar unit utama yang mengampu pencapaian target kinerja yang sama.

Untuk Menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Koordinasi di lingkungan internal satker untuk mengakselerasi kompilasi data capaian kinerja dan anggaran.
- b. Meningkatkan Koordinasi dengan unit satker terkait untuk melakukan validasi data capaian kinerja dan anggaran.

Berikut adalah 3 dokumen Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu

2. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A.

Outcome (dampak) dari tercapainya Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A adalah adalah meningkatnya jumlah satker di lingkungan kemendikbud yang memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). dengan predikat yang baik. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya sebanyak 36%, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi sebanyak 36% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan komponen:
 - Layanan Akuntabilitas Kinerja Kementerian;

Walaupun target kinerja telah tercapai, Kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target capaian output tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya unit kerja baik itu di tingkat satker maupun tingkat eselon 1 yang terlambat memberikan data dukung capaian kinerja dan anggaran di lingkungan kemendikbud.

- b. Karena ada restrukturisasi organisasi sehingga berpengaruh terhadap Evaluasi SAKIP di lingkungan Kemendikbud.
- c. Masih terdapat Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria Indikator kinerja yang baik.
- d. Masih terdapat Rencana Aksi yang disusun belum sesuai ketentuan.
- e. Aplikasi e-kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan).

Untuk Menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Koordinasi dengan satker di lingkungan kemendikbud untuk melakukan validasi dan akselerasi kompilasi data capaian kinerja dan anggaran beserta data dukungnya.
- b. Meningkatkan Koordinasi dengan unit satker terkait untuk melakukan validasi data capaian kinerja dan anggaran.
- c. Mereviu Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria yang baik, supaya indicator kinerja yang ditetapkan memenuhi kriteria SMART.
- d. Melakukan sosialisasi penyusunan rencana aksi atas target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Gambar 1.8 Kegiatan Pembinaan SAKIP Kemendikbud

No	Nama Unit	Total Reviu	AA	A	BB	B	CC	C	D
1	Sekretariat Jenderal	14	0	11	3	0	0	0	0
2	Inspektorat Jenderal	5	0	5	0	0	0	0	0
3	Ditjen GTK	19	0	10	8	1	0	0	0
4	Ditjen Pauddasmen	69	0	27	32	9	1	0	0
5	Ditjen Kebudayaan	35	0	7	12	15	1	0	0
6	Ditjen Dikti	89	0	24	29	26	5	3	2
7	Ditjen Diksi	49	0	10	14	16	6	1	2
8	Badan Bahasa	33	0	7	16	9	0	1	0
9	Balitbangbuk	15	0	13	2	0	0	0	0
	Unit Utama	7	0	4	3	0	0	0	0
total		335	0	118	119	76	13	5	4

Gambar 1.9 Persentase Satker yg predikat SAKIP-nya minimal A sebanyak 118 dari 335 satker = 36%

Sasaran Strategis Kegiatan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan, Realisasinya didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja satker Biro Perencanaan.

Pada tahun 2020, ditargetkan terealisasi kinerjanya dengan predikat BB, setelah diukur pencapaiannya, kinerjanya terealisasi dengan predikat A dengan persentase capaian sebesar 100%.

Perealisan target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Dukungan Manajemen Satker, dengan suboutput:
 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan ;
 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

Walaupun target kinerja telah melebihi target, Kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target capaian output tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala internal dalam mengumpulkan data capaian kinerja dan anggaran di lingkungan satker Biro Perencanaan.
- b. Kurangnya SDM yang memadai di bidang pengelolaan SAKIP.

Untuk Menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kompilasi data capaian kinerja anggaran dan data dukung evaluasi SAKIP secara berkala setiap bulannya sehingga proses evaluasi SAKIP oleh itjen dan Menpan-RB dapat berjalan dengan baik.
- b. Melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang SAKIP melalui pelatihan-pelatihan dan diklat pembinaan SDM SAKIP.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Tahun : 2019

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, masuk dalam kategori BB dengan nilai 74,85

Dengan interpretasi : Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| 1. Perencanaan Kinerja (30%) | : 24,19% |
| 2. Pengukuran Kinerja (25%) | : 21,20% |
| 3. Pelaporan Kinerja (15%) | : 10,78% |
| 4. Evaluasi Kinerja (10%) | : 4,94% |
| 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | : 13,75% |

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, direkomendasikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja :

1. Tujuan Strategis yang ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator kinerja) dan target kinerja;
2. Rumusan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan Strategis, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Renstra agar berorientasi hasil (outcome);
3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) agar di lengkap dengan definisi operasional dan rumus/metode perhitungannya untuk keandalan data kinerja yang disajikan;
4. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

B. Pengukuran Kinerja :

1. Menyusun POS tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja;
2. Melakukan pengukuran/monitoring kinerja atas target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang telah disusun, secara periodik dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja.kemendikbud.go.id;
3. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan untuk pemberian reward dan punishment.

C. Pelaporan Kinerja :

1. Pada Iktisar Eksekutif, agar menyajikan realisasi target kinerja dari masing-masing target IKK yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan menyajikan perbandingan capaian target kinerja tahun-tahun sebelumnya, dalam bentuk infografis dan menyajikan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pada Bab II agar menyajikan visi, misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra satuan kerja dan menyajikan Iktisar dari perjanjian kinerja;
3. Pada Bab III A, agar menyajikan perbandingan capaian target kinerja tahun-tahun sebelumnya dan menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir renstra;

Gambar 1.10 Laporan Hasil Evaluasi Satker dari Kemenpan-RB, Biro Perencanaan mendapat nilai 74,85 dan masuk dalam kategori BB

2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80.

Outcome (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran satker dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan dan komponen/subkomponen sebagai berikut:

- Layanan Dukungan Manajemen Satker, dengan suboutput:
 - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

Walaupun target kinerja telah melebihi target, kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target capaian output tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pandemi Covid-19 menyebabkan terlambatnya realisasi dan penyerapan anggaran diakibatkan terhentinya berbagai kegiatan sampai dengan semester pertama.
- b. Pandemi Covid-19 memerlukan adanya alokasi anggaran khusus untuk pengadaan alat, sarana kesehatan, fasilitas pendukung kesehatan seperti multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh pegawai. Sterilisasi sarana kantor dsb. Sehingga revisi dan realokasi anggaran mutlak diperlukan.
- c. Masih banyak ditemukan keterlambatan penyerahan data kontrak untuk didaftarkan ke KPPN.

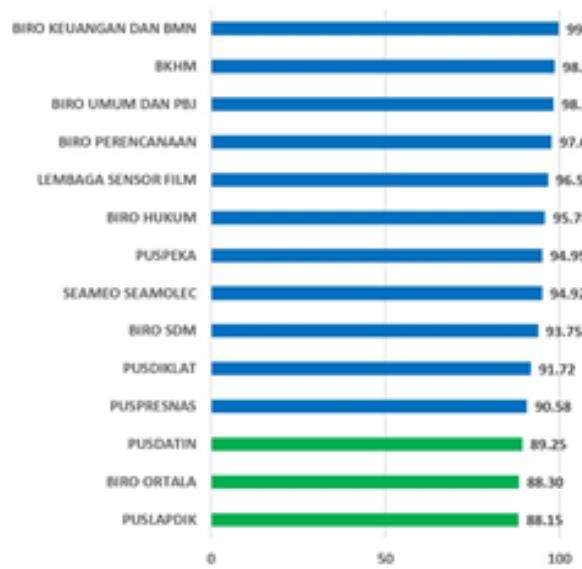
Untuk Menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai Semester ke 2 Tahun anggaran 2020.
- b. Melakukan alokasi anggaran untuk mendukung pemenuhan fasilitas pendukung kesehatan pegawai dalam menghadapi Pandemi Covid-19
- c. Melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait untuk melengkapi data kontrak sehingga pendaftaran ke KPPN dapat terlaksana dengan baik.



Gambar 1.11 Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan dengan KPP

Capaian Total Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L TA 2020 Kantor Pusat Setjen Per 31 Januari 2021



No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai EKA (60%)	Nilai IKPA (40%)	Total Nilai Kinerja
1	690285	BIRO KEUANGAN DAN BMN	99,68	99,69	99,68
2	626173	BKHM	99,53	97,06	98,54
3	137590	BIRO UMUM DAN PBJ	98,61	97,67	98,23
4	690271	BIRO PERENCANAAN	97,12	98,52	97,68
5	902743	LEMBAGA SENSOR FILM	96,80	96,28	96,59
6	690292	BIRO HUKUM	99,13	90,76	95,78
7	690398	PUSPEKA	99,65	87,90	94,95
8	610347	SEAMEO SEAMOLEC	99,02	88,77	94,92
9	690307	BIRO SDM	96,93	88,97	93,75
10	723007	PUSDIKLAT	95,70	85,74	91,72
11	690397	PUSPRESNAS	98,32	78,97	90,58
12	414701	PUSDATIN	92,93	83,74	89,25
13	690396	BIRO ORTALA	96,84	75,48	88,30
14	690399	PUSLAPDIK	90,25	84,99	88,15



Gambar 1.12 Nilai Kinerja Anggaran Satker Biro Perencanaan sebesar 97,68

B. Realisasi Anggaran

Berikut dijabarkan hasil capaian realisasi anggaran yang telah diserap dalam rangka merealisasikan target capaian output, sesuai yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.



Sasaran Strategis Kegiatan pertama : Meningkatnya Kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp11.345.542.000,- dan terealisasi sebesar Rp9.939.486.017,- dengan persentase capaian sebesar 87.61%

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut, didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp2.730.842.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.481.471.641,- dengan persentase capaian sebesar 90,87%.
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran, pada tahun 2020

- dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp538.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp370.379.000,- dengan persentase capaian sebesar 68,81%.
3. Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp8.076.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp7.087.635.376,- dengan persentase capaian sebesar 87,76%.

Sasaran Strategis Kegiatan kedua : Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan, Realisasinya pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp24.243.329.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.909.576.064,- dengan persentase capaian sebesar 94,50%.

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut, didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp16.227.141.000,- dan terealisasi sebesar Rp15.095.479.781,- dengan persentase capaian sebesar 93,03%.
2. Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp342.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp277.700.753,- dengan persentase capaian sebesar 81,00%.
3. Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp7.503.908.000,- dan terealisasi sebesar Rp7.368.556.530,- dengan persentase capaian sebesar 98,20%.
4. Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp169.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp167.839.000,- dengan persentase capaian sebesar 99,06%.

Sasaran Strategis Kegiatan ketiga : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola akuntabilitas Kinerja Kemendikbud, Realisasinya pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp6.680.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.808.051.899,- dengan persentase capaian sebesar 86,94%.

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut, didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp629.548.000,- dan terealisasi sebesar Rp591.658.000,- dengan persentase capaian sebesar 93,98%.
2. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp6.051.032.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.216.393.899,- dengan persentase capaian sebesar 86,21%.

Sasaran Strategis Kegiatan keempat : Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan, Realisasinya pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp8.586.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp7.647.217.025,- dengan persentase capaian sebesar 89,06%.

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut, didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu :

1. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp2.132.466.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.089.507.000,- dengan persentase capaian sebesar 97,99%.
2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran (hasil revisi) sebesar Rp6.454.240.000,-342.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.557.710.025,- dengan persentase capaian sebesar 86,11%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

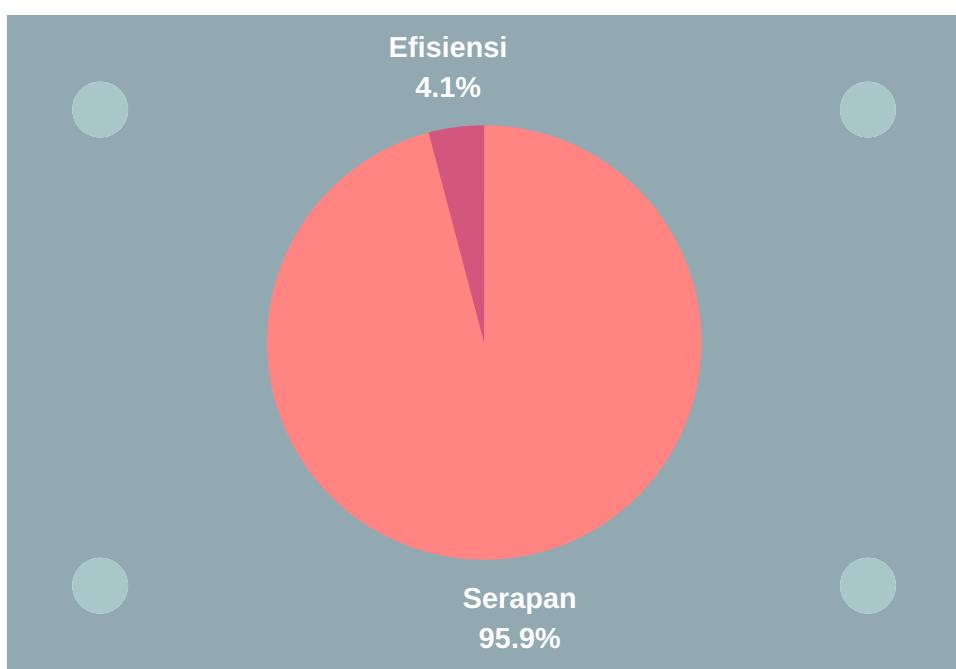
- Pandemi Covid-19 menyebabkan terlambatnya realisasi dan penyerapan anggaran hampir sepanjang tahun 2020

Untuk Mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai Semester ke 2 Tahun anggaran 2020 sehingga realisasi anggaran dapat dimaksimalkan.

C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Apabila melihat realisasi anggaran akhir tahun (data molk.kemdikbud.go.id) setelah adanya revisi dibandingkan dengan pagu yang tersedia maka dapat dihitung efisiensi anggaran yang dilakukan Biro Perencanaan adalah sebesar Rp6.070.637.295,- dari total anggaran yang tersedia yaitu Rp147.675.320.000,- atau sebesar 4,11%.



Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Perencanaan merupakan laporan kinerja yang memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam; (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Perencanaan Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri dengan Sekretaris Jenderal. Akuntabilitas kinerja Kemendikbud, selain diukur berdasarkan indikator kinerja juga turut dilakukan analisis permasalahan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Pengukuran Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2020, Januari-Desember 2020 telah dilaksanakan, dari 11 Indikator Kinerja 6 mencapai target 100% dan 5 indikator mencapai realiasi output >100%. Hasil realisasi anggaran untuk mendukung capaian kinerja tersebut dari total pagu sebesar Rp147.675.320.000,- dapat terserap sebesar **Rp141.604.682.705,- (95,89%)**.

B. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Pada saat ini Biro Perencanaan sudah mengimplementasikan sejumlah aplikasi beberapa diantaranya adalah aplikasi E-Planning, SAKTI, E-Kinerja, Smart DJA, Emonev Bappenas, SIKAP, SIMTRADA dan SIMPROKA. Untuk Kedepannya Aplikasi-aplikasi tersebut akan terus digunakan dan beberapa akan dikembangkan sesuai kebutuhan user di lingkungan Biro Perencanaan sehingga seluruh proses pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dapat berjalan dengan baik dan dapat terus menjaga ritme kerja dan meningkatkan kinerja.

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Perencanaan, membantu optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran serta mengatasi permasalahan-permasalahan substansif dan administratif yang dihadapi oleh Biro Perencanaan.

Lampiran

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. SAMSURI
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AINU NA'IM
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Jenderal

AINUN NA'IM

Jakarta, 2020
Kepala Biro Perencanaan

M. SAMSURI

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.25%
		Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori Baik
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item
		Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	70%
		Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72%
		Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	71%
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3 Laporan
		Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	45%
4.	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai 80

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan/Output	Anggaran
1.	Layanan Perencanaan	31.933.084.000
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20.439.021.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.471.756.000
4.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.797.840.000
5.	Layanan Perkantoran	15.404.176.000
Jumlah		78.045.877.000

Sekretaris Jenderal



AINUN NA'IM

Jakarta, 2020

Kepala Biro Perencanaan



M. SAMSURI

B. Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2020



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Biro Perencanaan
dengan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ainun Na'im, Ph.D
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Jenderal

Prof. Ainun Na'im, Ph.D

Jakarta, Desember 2020
Kepala Biro Perencanaan

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	90%
		Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori Baik
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item
		Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	70%
		Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72%
		Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	70%
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3 Laporan
		Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	36%
4.	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai 80

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan/Output	Anggaran
1.	Layanan Perencanaan	24.921.769.000
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.136.548.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.471.756.000
4.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.797.840.000
5.	Layanan Perkantoran	12.864.687.000
Jumlah		65.192.600.000

Jakarta, Desember 2020

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Perencanaan



Prof. Ainun Na'im, Ph.D



Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T

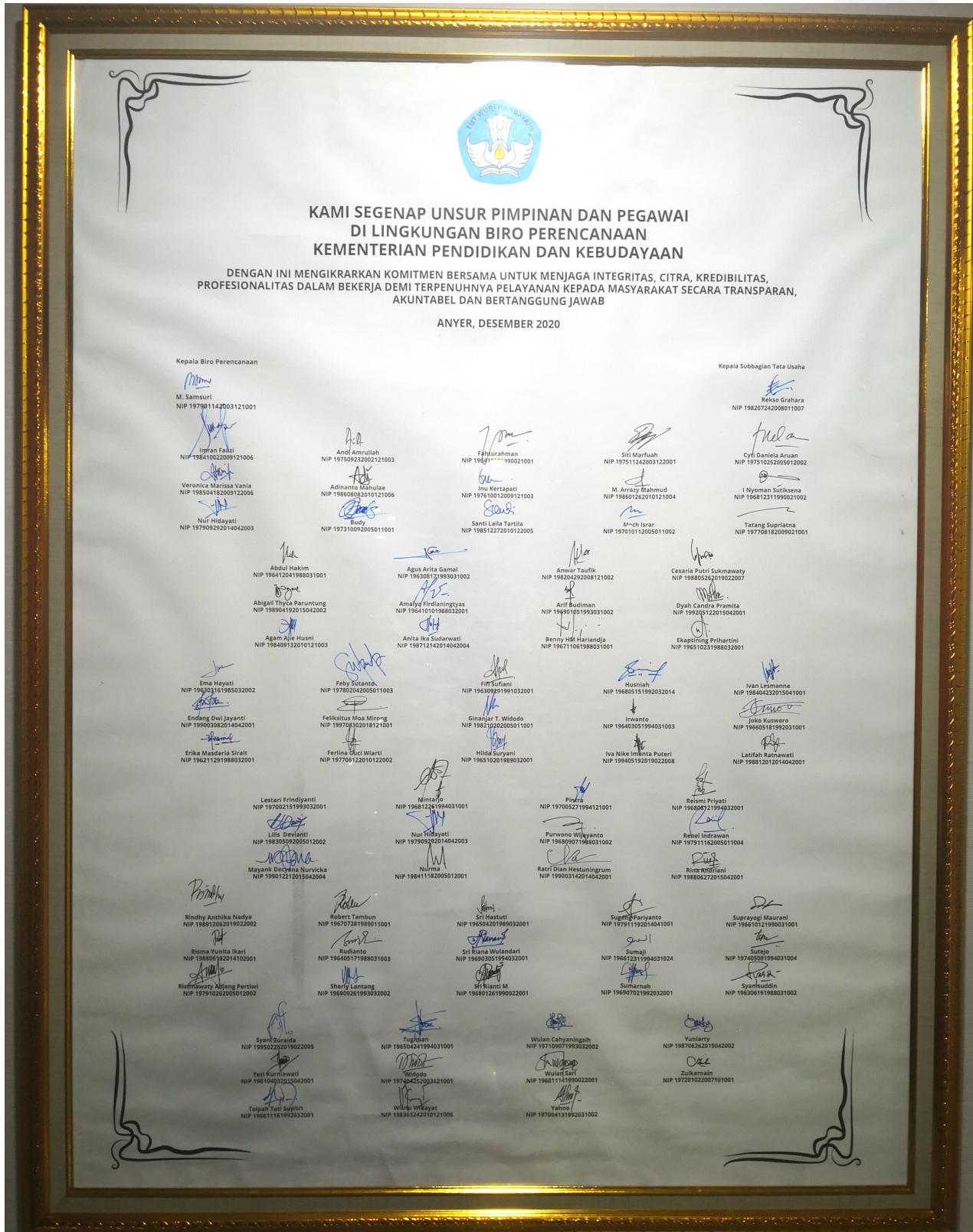
C. Tabel Cascading Rencana Strategis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Capaian 2020	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks		71,5	73	74,5	76	77,5	
1 Program Dukungan Manajemen								
SP 1.1 Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas								
IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB	BB	BB	Sangat baik	A	A	
IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	
IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	90,70	71,5	73	74,5	76	77,5	
IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	17,90	16	20	22	23	35,4	
1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja								
SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud								
IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100	100	100	100	100	100	
IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	100	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	
IKK Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	%	Sangat Baik	Baik	45	55	65	80	
SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan								
IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	item	1	1	2	3	3	3	
IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	99	70	75	80	85	94	
IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	97,70	72	74	76	78	80	
IKK Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	97	71	72	73	74	75	
SK Meningkatnya tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud								
IKK Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	laporan	3	3	3	3	3	3	
IKK Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	36	45	45	55	65	80	
SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan								
IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	predikat	BB	A	A	A	A	A	
IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	kategori	96,63	80	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

D. Dokumen Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran	Realisasi				
		(3)	(4)		Target Kinerja	%	Anggaran	%	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)				
Meningkatnya Kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	1	Percentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	100	%	2.730.842.000	100	100	2.481.471.641	90,87
	2	Percentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	90	%	538.290.000	100	111	370.379.000	68,81
	3	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik	Kategori	8.076.410.000	Sangat Baik	100	7.087.635.376	87,76
Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan	4	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1	item	16.227.141.000	1	100	15.095.479.781	93,03
	5	Percentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	70	%	342.840.000	90,70	129,5	277.700.753	81,00
	6	Percentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72	%	7.503.908.000	97,70	135,7	7.368.556.530	98,20
	7	Percentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	70	%	169.440.000	75,50	107,8	167.839.000	99,06
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	8	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	3	Laporan	629.548.000	3	100	591.658.000	93,98
	9	Percentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	36	%	6.051.032.000	36	100	5.216.393.899	86,21
Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan	10	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	BB	Predikat	2.132.466.000	A	100	2.089.507.000	97,99
	11	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan Minimal 80	80	Nilai	6.454.240.000	97,68	122,1	5.557.710.025	86,11

E. Komitmen Bersama



BIRO PERENCANAAN

Jalan. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270
Komplek Kemendikbud, Gedung C lantai 6-7 Telp 021 5711144 ext 2611